

## KOORDINASI ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENGELOLAAN EKOWISATA DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

*Astari B. Mamahit<sup>1</sup>*

*Ronny Gosal<sup>2</sup>*

*Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

### Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah dalam pengelolaan ekowisata di Kabupaten Minahasa Tenggara. Ekowisata (*ecotourism*) mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, pada hakekatnya ekowisata adalah suatu bentuk wisata yang bertanggungjawab terhadap kelestarian area yang masih alami (natural area), memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat setempat. Atas dasar ini, bentuk ekowisata merupakan bentuk gerakan konservasi. Koordinasi antar satuan kerja yang terkait sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan sector pariwisata di sebuah daerah termasuk pada kabupaten Minahasa Tenggara. Potensi yang dimiliki daerah tersebut sangat menjanjikan apabila dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat melalui dinas atau instansi terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah koordinasi SKPD, yang dikaji dari teori koordinasi berdasarkan konsep yang dikemukakan menurut Sutarto (2006:152-153). Hasil penelitian menunjukkan Koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan ekowisata di Kabupaten Minahasa Tenggara ini pada kenyataannya memang menghadapi beberapa kendala, sehingga membuat kepariwisataan di Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini berjalan dengan apa adanya bahkan cenderung monoton tanpa ada sentuhan yang berarti meskipun terpenuhinya pencapaian beberapa target.

**Kata Kunci:** Koordinasi, SKPD, Ekowisata

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

## Pendahuluan

Ekowisata adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Semula ekowisata dilakukan oleh wisatawan pecinta alam yang menginginkan di daerah tujuan wisata tetap utuh dan lestari, di samping budaya dan kesejahteraan masyarakatnya tetap terjaga. Namun dalam perkembangannya ternyata bentuk ekowisata ini berkembang karena banyak digemari oleh wisatawan. Wisatawan ingin berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan kegiatan bisnis. Ekowisata kemudian adalah bentuk baru dari perjalanan bertanggungjawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri pariwisata.

Dapat dimengerti bahwa ekowisata dunia telah berkembang sangat pesat, ternyata beberapa destinasi dari taman nasional berhasil dalam mengembangkan ekowisata ini. Bahkan di beberapa wilayah berkembang suatu pemikiran baru yang berkaitan dengan pengertian ekowisata. Fenomena pendidikan diperlukan dalam bentuk wisata ini. Hal ini sejalan dengan perkembangan ekowisata adalah wisata berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis.

Definisi ini memberi penegasan bahwa aspek yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus, *alternative tourism* atau *special interest tourism* dengan obyek dan daya tarik wisata alam.

Di Kabupaten Minahasa Tenggara masih terdapat banyak sekali potensi alam yang dapat dijadikan ekowisata, baik pengunungan maupun pantai. Disamping itu terdapat banyak situs ekowisata sejarah, yang sampai saat ini masih alami belum tersentuh oleh pembangunan, hal inilah yang dijadikan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dikembangkan dan dilestarikan agar dapat lebih mempromosikan wisata daerah dan

menambah pendapatan asli daerah demi kesejahteraan masyarakat. Secara legalitas penetapan program ekowisata telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dibawah kepemimpinan Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap, SH, hal ini juga sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.

Besarnya potensi wisata di Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut sebenarnya menjadi peluang yang besar pula bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk dapat mengembangkannya sebagai modal pembangunan dalam meningkatkan ekonomi daerah. Salah satu faktor penentunya adalah keterlibatan atau peran aktif dari berbagai pihak, terutama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai unit organisasi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan pembangunan pariwisata daerah. Pertanyaannya, seberapa jauh peran yang dimainkan oleh Dinas Kebudayaan dari Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara di dalam pengembangan ekowisata dan bagaimana permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekowisata tersebut di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dalam implementasi pengelolaan dan pengembangan ekowisata daerah Minahasa Tenggara masih mengalami berbagai kendala, koordinasi yang dimaksudkan adalah antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu instansi terkait yang berhubungan langsung dengan pengembangan Ekowisata seperti Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, serta dinas-dinas lainnya yang terkait. Koordinasi dilakukan untuk menciptakan suatu usaha yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Dalam hal ini dinas-dinas terkait Kabupaten Minahasa Tenggara melalui visi, misi yang memiliki tujuan untuk mengembangkan industri pariwisata yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah dan

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

kesejahteraan masyarakat apakah telah melakukan koordinasi yang baik dengan instansi yang terkait. Dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, disebutkan bahwa: susunan kepengurusan Tim Koordinasi Ekowisata di kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota
- b. Sekretaris : Kepala Dinas/lembaga yang membidangi pariwisata
- c. Anggota : Kepala SKPD terkait, asosiasi pengusaha pariwisata, tenaga ahli, akademisi yang berpengalaman, dan masyarakat yang diperlukan.

Namun pada kenyataannya masih ditemukan hal-hal yang dapat diartikan bahwa belum adanya koordinasi yang baik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara dengan instansi terkait maupun masyarakat. Hal-hal tersebut diantaranya adalah:

1. Masih banyak potensi ekowisata yang belum diketahui oleh publik, begitu pula media promosi yang digunakan masih sangat minim.
2. Adanya salah satu jembatan yang terdapat pada jalan utama menuju kawasan wisata yang sering rusak yang disebabkan oleh tanah longsor dan banjir.
3. Adanya beberapa jalan menuju kawasan wisata yang terbengkalai yang mengurangi rasa nyaman bahkan membahayakan bagi wisatawan maupun masyarakat.
4. Kurangnya alat transportasi seperti angkutan orang di kawasan wisata, sehingga bagi wisatawan yang tidak menggunakan kendaraan pribadi akan kesulitan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata.
5. Terbatasnya jumlah biro penyedia perjalanan wisata baik swasta maupun dari pihak pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang dapat memberikan informasi dan menyediakan *tour guide*.
6. Masih minimnya sarana dan prasarana

tempat akomodasi seperti hotel dan penginapan untuk dapat menampung wisatawan yang berkunjung di Minahasa Tenggara.

Dari beberapa faktor tersebut diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten dalam hal ini sebagai faktor utama selain pihak swasta dan masyarakat dinilai masih perlu ditingkatkan upaya koordinasi dalam melaksanakan tugas pekerjaannya untuk membangun pariwisata daerah yang berbasis ekowisata. Lalu bagaimanakah pengelolaan pariwisata daerah selama ini? Siapa saja yang terlibat dalam pengembangan industri pariwisata daerah, apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah Kabupaten? Tentunya jika diabaikan tanpa ada pemecahan ini bertentangan dengan apa yang diharapkan pemerintah guna mengembangkan industri pariwisata yang berbasis ekowisata daerah berdaya saing.

## Tinjauan Pustaka Konsep Koordinasi

Pengertian koordinasi menurut Stoner dalam (Sugandha, 2006:13) adalah “proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit yang terpisah (bagian atau bidang fungsional dari suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien”. Fungsi koordinasi sangat penting, apalagi bila administrasi harus berjalan sebagai suatu sistem, sebagai suatu kesatuan yang bulat dari bagian-bagian (sub-sistem) yang saling berhubungan, saling menunjang dan saling bergantung agar administrasi berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuannya.

Menurut Sutarto (2006:145-146) koordinasi sebenarnya dapat dipakai satu istilah yaitu keselarasan. Baik kesatuan tindakan, kesatuan usaha, penyesuaian antar bagian, keseimbangan antar bagian maupun sinkronisasi semuanya berdasarkan keselarasan. Atas dasar itu, koordinasi dapat berasaskan bahwa di dalam organisasi harus ada keselarasan aktivitas antar satuan organisasi atau keselarasan antar pejabat.

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang

diberikan dalam menyelesaikan tugas. Dengan adanya penyampaian informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai.

Menurut Ismail Solihin (2009:91), karakteristik pertama dari organisasi adalah adanya koordinasi upaya dari sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi. Penggabungan yang terkoordinasi dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan upaya perseorangan. Hasibuan (2014: 85) berpendapat bahwa: “koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”.

Menurut Yohanes Yahya (2006:95), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Handoko (2008:195), koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2014:85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Manullang (2008:72) koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam

mencapai tujuan organisasi.

## **Konsep Ekowisata**

Istilah ekowisata dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah dimana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam (Direktorat Pengembangan Pariwisata, 2009:31).

Ekowisata merupakan perjalanan wisata alam yang alami maupun buatan yang bertujuan untuk menjamin kelestarian alam dan sosial - budaya. Ekowisata menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu keberlangsungan alam atau ekologi, memberi manfaat ekonomi, dan dapat diterima dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan ekowisata secara langsung dapat memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal (Purnawan Negara. 2015:34).

Ekowisata merupakan pengembangan pariwisata yang ramah lingkungan, mengedepankan konservasi lingkungan, pendidikan lingkungan dan menguntungkan penduduk lokal (meningkatkan perekonomian penduduk lokal). Penyelenggaraan ekowisata pada dasarnya dilakukan dengan kesederhanaan, memelihara keaslian alam dan lingkungan, memelihara keaslian adat istiadat, kebiasaan hidup atau *the way of life*, menjaga kelestarian flora dan fauna, serta melestarikan lingkungan hidup sehingga terjadinya suatu keseimbangan antara kehidupan manusia dengan lingkungan alam (Iwan Nugraha, 2012:58).

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Fokus penelitian ini adalah koordinasi SKPD, yang dikaji dari teori koordinasi berdasarkan konsep yang dikemukakan menurut Sutarto (2006:152-153) peningkatan koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

- a. Partisipasi dari setiap unsur yang bertugas dalam bidang tertentu, dalam hal ini adalah Badan Perencanaan

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pembangunan Daerah, Dinas Pariwisata,  
Dinas Pendidikan.

- b. Pendelegasian wewenang
- c. Komunikasi antar SKPD

adapun objek wisata yang menjadi acuan penelitian, akan dilaksanakan di Aer Konde Ratahan yang letaknya berada di wawali Pasan, kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara Pembahasan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Informan yang dipilih yaitu:

1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDA).
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
3. Kepala Dinas Pendidikan
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
5. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
6. Tokoh dan warga masyarakat (2 orang )

## Pembahasan

Dalam meningkatkan koordinasi, maka ada 8 instrumen yang akan diteliti yaitu Partisipasi dalam Pengembangan Industri Pariwisata, Pendelegasian Wewenang, Komunikasi dalam Koordinasi Lintas Sektor, Anggaran dalam Koordinasi Lintas Sektor, Koordinator dalam Pelaksanaan Koordinasi, Mekanisme Pola Koordinasi Lintas Sektor, Faktor Pendorong dan Penghambat Koordinasi, Manfaat Koordinasi Lintas Sektor.

- a. Partisipasi dalam Pengembangan Ekowisata

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sangat berperan program pengembangan industry ekowisata. Kemudian Dinas Pariwisata didukung oleh Dinas Pekerjaan umum yang berperan sebagai pembangun sarana prasarana khususnya infrastruktur dalam mengakses objek-objek wisata. Kemudian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga di dukung oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang berperan dalam mengatur dan memberi pelayanan dalam hal transportasi umum untuk wisatawan maupun masyarakat dalam mengakses objek wisata di Kabupaten Minahasa Tenggara. Masyarakat sebagai

stakeholder dalam pengembangan industri pariwisata mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan pariwisata daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan menyatakan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Hasil penelitian yang diperoleh mengenai fasilitas pendukung kegiatan wisata bahari (Resort dan Diving Operator) di pantai Bentenan saat ini sudah ada tetapi jumlahnya masih minim. Sarana yang sudah ada saat ini adalah adanya tempat penginapan berupa resort namun sayangnya resort tersebut tidak dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan kesan yang tidak menarik bagi wisatawan. Selain resort di atas, lahan tersebut juga sudah disediakan tempat untuk duduk-duduk yang dipayungi dengan ijuk, serta tempat untuk berjemur. Memasuki area ini suasana terasa nyaman karena dikelilingi dengan pohon cemara pantai. Dalam keadaan panas terik sekalipun, di dalam area ini masih tetap terasa nyaman.

Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata/ODTW dan pelestarian budaya. Secara umum, objek wisata yang ada di kabupaten Minahasa Tenggara, belum sepenuhnya dikelola oleh dinas kebudayaan dan pariwisata seperti yang dikatakan oleh staf dinas kebudayaan dan pariwisata dalam wawancara sebagai berikut :

*“...saat ini masih banyak objek wisata yang sepenuhnya adalah milik keluarga/perorangan, bukan milik pemerintah, jadi kami dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata hanya memonitoring dan menerbitkan tiket/karcis retribusi masuk bagi objek wisata tersebut...”*

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata ini ialah membenahi segala sesuatu yang ada di Objek wisata seperti penambahan tempat-tempat sampah, WC umum, papan informasi bagi wisatawan untuk tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan. dinas kebudayaan dan pariwisata juga memberikan kesempatan berusaha kepada masyarakat yaitu dengan

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

memberikan izin pembangunan toko-toko souvenir.

Upaya pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan merupakan salah satu kegiatan yang berimplikasi pada perencanaan dan pengembangan produk suatu wilayah. Pengembangannya harus menjangkau berbagai tingkat kecamatan mulai dari tingkat objek wisata, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, tingkat kota bahkan sampai ke tingkat propinsi. Pada masing-masing kawasan pengembangan di kabupaten toraja utara ini, diberi nama dan ditentukan satu kelurahan sebagai pusat pertumbuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengatakan bahwa telah terbentuk Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) yakni sebagai berikut:

1. Kawasan pengembangan A: wisata sejarah-budaya yang di dukung tema Wisata Agro.
2. Kawasan pengembangan simpul B atau simpul pengembangan: wisata alam dengan dukungan tema wisata sejarah-budaya.
3. Kawasan pengembangan C atau simpul pengembangan dukungan temanya adalah wisata sejarah-budaya.

Pengelompokan kawasan pengembangan pariwisata (KPP) ini di dalamnya terdapat objek dan daya tarik wisata andalan kabupaten yang tersebar di berbagai kecamatan. Setiap KPP itu memiliki tema utama dan diperkuat beberapa tema pendukung, namun tema utamalah yang kemudian menjadi koridor utama pengembangan pariwisata.

Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) dalam kesatuan KPP ini di harapkan dapat mengarahkan pariwisata minahasa tenggara menjadi lebih fokus, namun tetap memberikan fleksibilitas/kelenturan untuk potensi-potensi lain seperti yang dikatakan lebih lanjut oleh kepala dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai berikut :

*“...dengan adanya pembagian kawasan pengembangan pariwisata ini akan menciptakan keseimbangan*

*bagi pertumbuhan antar kawasan sehingga kawasan tertentu tidak diabaikan. Pengelompokan kawasan ini juga diharapkan berguna bagi masyarakat untuk menggali potensi yang ada di masing-masing wilayah kawasan pengembangan...”*

Pengembangan produk wisata minahasa tenggara berorientasi pada potensi dan daya tarik budaya yang unik dan khas yang didukung oleh budaya, seni dan sejarah serta keindahan panorama alam. Produk wisata ini dikembangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kecenderungan pasar pariwisata yang berkembang, terutama tema-tema wisata minat khusus yang dapat menarik wisatawan asing. Dalam pengembangan produk wisata ini, diperlukan penetapan produk wisata andalan bagi kabupaten toraja utara sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di kabupaten minahasa tenggara di tingkat regional, nasional dan internasional, seperti dikutip dalam wawancara berikut:

*“... saat ini, yang menjadi produk wisata andalan kabupaten minahasa tenggara adalah objek pantai lakban, pantai bentenan dan wisata budaya”.*

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara akan mengembangkan sejumlah objek wisata warisan budaya, dan sejarah yang ada di daerah, seperti yang dituturkan oleh kepala dinas pariwisata sebagai berikut:

*“selain objek wisata alam, Pemkab juga memberikan perhatian kepada pengembangan objek wisata budaya, serta peninggalan sejarah beberapa objek wisata budaya yang akan dikembangkan yakni Batu Lesung di Kecamatan Tombatu dan Pasan. Objek wisata batu Pasak Wanua di Kecamatan Ratahan, Ratahan Timur, serta Pasan yang merupakan batu peninggalan dari era megalitikum yang masih tersisa di Minahasa Tenggara”.*

Budaya yang dijaga dan dilestarikan oleh penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara tidak dapat dipisahkan dengan budaya penduduk di Minahasa, Kota Tomohon, dan Kabupaten Minahasa Utara.

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Selain dilatarbelakangi oleh sejarah "Orang Minahasa" yang berasal dari etnis Minahasa, juga karena Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan Kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Minahasa Selatan sehingga budaya Minahasa yang sudah dilestarikan begitu lama tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Minahasa Tenggara yang religious.

Umumnya yang mendiami wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara berasal dari sub etnis Ponosakan, Tonsawang, Pusomaen, pasan dengan menggunakan bahasa daerah masing-masing Selain memiliki musik khas familiar (ramah), penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara juga mempunyai jiwa/semangat Mapalus (suka menolong/membantu satu dengan yang lain). Dalam rangka mengucap syukur kepada Tuhan terhadap hasil panen (berkat), masyarakat di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yang mayoritas beragama Kristen merayakannya dengan "Pengucapan Syukur".

Sejak dulu secara turun temurun masyarakat di Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara menjaga dan memelihara seni budaya traditional, baik musik bamboo/clarinet, maengket, music kolintang, dan tarian kabasaran. Potensi kepariwisataan di Kabupaten Minahasa Tenggara ini cukup menjanjikan, kendati objek wisata bunaken masih menjadi andalan kepariwisataan di Provinsi Sulawesi Utara. Tercatat cukup banyak objek wisata yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu: Teluk Buyat dengan terumbu karang buatan yang sedang dalam proses pengerjaan dengan bantuan PT. Newmont Minahasa Raya, Pantai Bentenan, Pantai Lakban, Danau Buliling, Bukit Pengharapan, serta Pasak Wanua (batuan yang jaman dahulu digunakan sebagai pengesahan berdirinya sebuah desa).

Salah satu program Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Pengelolaan Kekayaan Budaya sektor pariwisata, baik di tingkat nasional, regional, dan internasional melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dalam rangka upaya promosi objek wisata tersebut maka perlu dilaksanakan upaya strategis untuk lebih memperkenalkan

Kabupaten Minahasa Tenggara, antara lain melalui Kegiatan Seminar Budaya dalam rangka revitalisasi budaya lokal yang akan menjadi salah satu ajang dalam rangka mempromosikan pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Budaya dan adat istiadat mempunyai arti tersendiri bagi setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan keragaman kekayaan alam dan budaya inilah diharapkan dapat menunjukkan identitas bagi daerah, terlebih khusus pada era otonomi daerah, dengan adanya penyerahan urusan-urusan pemerintahan melalui prinsip desentralisasi, dimana seperti yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 32 ayat 2 huruf f bahwa: dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang ditunjukkan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Atas dasar itulah tiap-tiap daerah perlu untuk melakukan pengembangan dan pelestarian budaya daerah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk bagi Kabupaten Minahasa Tenggara dimana salah satu bagian dari kebudayaan Minahasa, secara garis besar terdapat tiga anak suku yaitu: Tonsawang, Pasan, dan Ponosakan.

Dalam perjalanannya ketiga anak suku Tonsawang, Pasan, dan Ponosakan memiliki history tersendiri, sehingga menjadi kelompok sub etnis yang menjadi pribumi mendiami tanah Minahasa bagian tenggara. Pada mulanya sebutan awal minahasa adalah Malesung, berasal dari kata lesung artinya tanah yang berbentuk seperti lesung, karena terdapat beberapa buah gunung sehingga dinamakan Malesung (P.A. Gosal, dkk:1995:5), pada tahun 1428 para pemimpin minahasa sepakat untuk kembali mengadakan musyawarah, karena perang antar anak suku di Malesung masih sering terjadi, karena dipicu oleh beberapa alasan, terutama tidak merasa puas dengan penetapan tapal batas wilayah, melalui musyawarah ituberhasil dicapai suatu keputusan penting dimana nama Malesung dirubah menjadi "Nima Esa Mina Esa" kemudian dalam perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan "Minahasa", dimana Minahasa berasal dari kata Esa yang

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

artinya satu, kemudian diberi awalan Ma dan sisipan In, maka terbentuklah kata Maha Esa, artinya menyatukan. Jadi kata Minahasa mengandung arti adalah yang menjadi satu, yang dimaksudkan disini adalah menyatukan segenap anak suku yang mendiami tanah Minahasa, yaitu suku Toutemboan, Tombulu, Tonsea, Toulour, Pasan, Ratahan, Ponosakan, Tonsawang dan Bantik (Dr. Godee E.C. Molsbergen, 1928:53).

Budaya yang tumbuh dan berkembang di Minahasa Tenggara tidak terlepas dari budaya Minahasa pada umumnya, suku Pasan, Tonsawang, dan Ponosakan meyakini bahwa kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan alam sebagai penopang seluruh aspek kehidupan manusia yang berinteraksi dengan alam. Dari alam manusia belajar tentang prinsip-prinsip hidup, kebajikan, dan kebijaksanaan, misalnya ketika akan membuka perkebunan atau menanam, terlebih dahulu harus melihat gejala-gejala alam seperti bulan dan bintang, mendengar bunyi suara burung atau gerak-gerik binatang lainnya yang diyakini sebagai pembawa isyarat dari Empung Walian Wangko. Kepercayaan tersebut relevan dengan pandangan Douglas J. Elwood (1992:91) tentang kecenderungan-kecenderungan hubungan interaksi antara manusia dengan alam, dimana alam dipandang sebagai sesuatu yang serba teratur dengan sendirinya dan serba lengkap sebagai suatu cosmos, memiliki hukum-hukumnya sendiri berdasarkan prinsip yang menatanya (Tao), terutama diletakkan pada saling ketergantungan yang koheren antara alam didalam dirinya sendiri serta hubungannya dengan manusia.

Budaya Minahasa tidak lepas dari pengaruh agama suku Minahasa yang diyakini oleh penduduk asli Minahasa, agama suku Minahasa terungkap pada hampir semua sektor kehidupan, adat istiadat, moral, etika, relasi kekeluargaan, dan kemasyarakatan yang terwujud melalui ritual-ritual, mitos, puisi, pribahasa, tari-tarian, nyanyian-nyanyian, doa-doa, relief-relief dan simbol-simbol, dimana cara mengungkapkan kepercayaan tersebut, tidak terlepas dari keterikatan hubungan manusia

dengan kuasa tertinggi, yaitu Empung Walian Wangko, yang adalah pencipta, sumber segala kehidupan yang mengaruniakan umur panjang, kesehatan, keberuntungan, kebahagiaan dan kekayaan, tetapi juga yang dapat menghukum atau menyatakan amarahnya kepada yang tidak hidup dalam ketaatan, untuk mewujudkan kembali ketaatan seseorang, yaitu dilakukan melalui nyanyian-nyanyian doa dalam bentuk ritual.

Secara filosofi agama suku Minahasa mengandung nilai-nilai religius yang terungkap dalam perilaku sosial, yakni:

- Masigi-sigian, artinya: saling menghormati satu sama lain.
- Masaali, artinya: pelayanan terutama anak terhadap orang tua.
- Marukup, artinya: kebersamaan atau solidaritas.
- Masuat Peleng atau Paesaan Indeken, artinya: musyawarah mufakat.
- Mapalus, artinya: saling membantu.

Mengacu dari uraian diatas, menjelaskan bahwa budaya Minahasa Tenggara sama sekali tidak dapat dipisahkan dengan agama sukunya, dimana keseluruhannya didasari dan bernafaskan ketentuan-ketentuan agama suku sebagai wujud manusianya yang bersifat religius. Sebelum mengerjakan sesuatu atau hendak melakukan aktivitas dalam segala aspek kehidupannya, terlebih dahulu menyebut Empung Walian Wangko, yang diyakini sebagai Tuhan Maha Agung, pencipta langit dan bumi, sumber segala kehidupan manusia.

Kebudayaan dan agama merupakan dua aspek dimana satu dengan lainnya saling berkaitan erat, Leslie Newbegin (1993:259) mengungkapkan bahwa agama adalah aspek dari kebudayaan, tetapi kebudayaan bukanlah keseluruhan dari agama itu. Kebudayaan Minahasa Tenggara mengenal ritual sebagai wujud ketaatan kepada kuasa Yang Maha Tinggi, ialah pencipta dan pemelihara langit dan bumi, yaitu Empung Walian Wangko sebagai embrio, sumber dari segala sumber kehidupan dan berkat, sekaligus kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan roh leluhur (dewa) yang disebut opo-opo, diyakini turut mempengaruhi kehidupan manusia, itu sebabnya baik Empung Walian Wangko,



maupun para Opo harus dipuja dan dihormati melalui ritual yang disebut Poso, atau di Tonsawang dan Pasan-Ratahan, disebut dumahes. Sesuai dengan tujuannya dumahes dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu dumahes keluarga, yang biasanya dilakukan dalam rangka pengucapan syukur atas berkat yang diperoleh, seperti hasil pertanian, perkawinan, kelahiran, hari ulang tahun atau menempati rumah baru. Kemudian selanjutnya adalah dumahes negeri, dilaksanakan dalam rangka menjaga negeri dari berbagai ancaman atau apabila negeri itu ditimpa suatu malapetaka seperti mewabahnya suatu penyakit atau gagal panen karena diserang hama.

Gambaran mengenai keadaan sosial budaya yang ada di Minahasa Tenggara, pada umumnya berkembang dari unsur dumahes itu sendiri, yaitu seperti:

## 1. Maengket

Maengket berasal dari kata Engket, artinya nyalakan atau bukakan, yang dinyalakan disini adalah semangat yang terus-menerus dipertahankan dalam memuja Empung Walian Wangko, Ninema In Tana Wo Langit (Tuhan Yang Maha Agung, Pencipta Langit dan Bumi) serta senantiasa memohon perlindungan dan berkat kepadanya sebagai Empung Walian Masule (Tuhan Maha Penolong dan Maha Kaya), sedangkan yang hendak dibukakan disini adalah mata, telinga dan hati Empung Malinga-Linga (Tuhan yang mendengar doa dan keluh kesah) akan menerima dan mengabulkan permohonan yang disampaikan, sehingga didalam prosesi Maengket masa lampau, terkandung filosofi tentang kehidupan manusia Minahasa sesungguhnya yang dituturkan melalui nilai-nilai sastra tinggi dan dibawakan oleh beberapa pasangan (laki-laki dan perempuan) dalam bentuk nyanyian (Pdt. Edmond Ch. Moningka, 2006:56).

## 2. Sumolo

Tradisi ketika pembangunan rumah selesai, sebelum pemilik rumah menempatnya terlebih dahulu dilaksanakan suatu ritual yang disebut sumolo, yaitu upacara naik rumah baru. Dipenghujung acara sumolo, seluruh hadirin mengadakan

pesta makan dan minum bersama sebagai wujud pengucapan syukur dari keluarga yang akan menempati rumah baru, beberapa tempat di Minahasa, acara pesta makan dan minum biasanya disebut sebagai nae rumah baru (Prof. Dr. J. Turang, 1997:225).

## 3. Iroyor Si Oki

Sesuai dengan tradisi Pasan-Ratahan dan Tonsawang, dikenal ritual Iroyor Si Oki, yaitu setelah lima hari bayi itu lahir, untuk pertama kalinya di bawa oleh ibunya menuruni tangga rumah menuju ke tanah dan diiringi oleh dua atau tiga wanita yang sudah berusia lanjut. Sering juga ritual iroyor si oki dilaksanakan dengan menghentar si bayi menuju sumber air, diiringi dengan barisan kaum keluarga beserta para kerabat, setelah tiba kepala si bayi disiram dengan air oleh walian sambil mengucapkan doa permohonan agar bayi itu diberikan kesehatan, umur panjang, dan menjadi orang yang berguna. Ketika saat orang Minahasa Tenggara umumnya telah memeluk agama Kristen, ritual iroyor si oki telah diganti dengan sakramen Baptisan di Gereja yang dilakukan oleh seorang Pendeta, sedangkan bagi agama Islam identic dengan istilah potong rambut (L. Adam, 1976:48).

## 4. Manambeng

Manambeng berasal dari kata tambeng, artinya gantung, jadi yang dimaksud dengan manambeng adalah tradisi menggantungkan, dalam hal ini menggantungkan ikan sebagai persembahan yang dilaksanakan oleh anak suku Tonsawang sebagai wujud pengucapan syukur ketika selesai panen. Tiba waktunya pelaksanaan manambeng, setiap keluarga sudah menyiapkan berbagai jenis masakan untuk dihidangkan kepada para kerabat atau kenalan dan segenap tamu yang akan datang berkunjung, ketika pengunjung hendak pulang mereka diberikan sawutan (bungkusan) oleh keluarga, diperuntukkan bagi keluarga tamu yang tidak sempat hadir, sawutan dalam tradisi anak suku Tonsawang mengandung makna me'beteng I kamang (membagi berkat) bagi sesama, seiring dengan itu berbagai seni tradisional seperti maengket digelar (Paulus A. Gosal & Christian H. Gosal, 2008:56).

## 5. Mangundam

Suatu ritual yang dilakukan untuk mengusir penyakit, baik yang datang secara fisik, maupun yang disebabkan oleh roh-roh jahat. Bagi anak suku Tonsawang dikenal dengan suatu pengobatan melalui ritual khusus, apabila penyakit itu disebabkan oleh roh jahat yang hanya boleh dilakukan oleh seorang walian atau mawengundam. Di Ponosakan dikenal dengan dengan kebiasaan membuat tanda silang dengan kapur pada pintu-pintu dan jendela-jendela rumah, untuk menolak pengaruh-pengaruh yang dapat mendatangkan penyakit (L. Adam, 1976:77).

Uraian rangkaian sejarah, keadaan sosial, serta filosofi yang melandasi masyarakat Minahasa Tenggara pada khususnya, sesuai dengan keadaan di masa sekarang ini telah mengalami degradasi yang diakibatkan oleh perkembangan jaman, terlebih ketika Agama Kristen (Katolik) masuk di tanah Minahasa pada tahun 1639 yang dibawa oleh bangsa Eropa khususnya Bangsa Spanyol, yang dilanjutkan dengan para misionaris dari Bangsa Belanda melalui VOC, kebiasaan-kebiasaan yang termaktub dalam ajaran dan ritual agama suku Minahasa mulai tergantikan dengan ajaran Agama Kristen, sehingga hingga saat ini sangat jarang sekali ditemui adanya ritual-ritual yang berhubungan dengan supranatural, karena memang hal tersebut tidak lagi diijinkan, atau sangat bertentangan dengan ajaran agama Kristen.

Imbas dari degradasi budaya tersebut, disatu sisi bernilai positif karena telah menghilangkan kepercayaan yang dianggap sebagai penyembahan kepada berhala/setan sehingga mengajarkan untuk percaya hanya kepada Empung Walian Wangko, Ninema In Tana Wo Langit, namun disisi lain degradasi tersebut mulai menghilangkan filosofi-filosofi yang tertanam bagi orang Minahasa, khususnya di Minahasa Tenggara, seperti: Masigi-sigian (saling menghormati satu sama lain), Masaali (pelayanan terutama anak terhadap orang tua), Marukup (kebersamaan atau solidaritas), Masuat Peleng atau Paesaan Indeken (musyawarah mufakat), dan Mapalus (saling membantu), demikian juga dengan penggunaan bahasa

daerah yang kelestariannya sudah mulai punah, hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat penggunaan bahasa Minahasa, khusus bagi ketiga anak suku yang ada di Minahasa Tenggara, yaitu Tonsawang, Pasan, Ponosakan, dimana hanya orang-orang tua, itupun tidak semuanya menggunakan bahasa daerah, terlebih bagi generasi muda yang ada sangat jarang ditemui penggunaan bahasa daerah, data awal ditemukan bahwa sebagian generasi muda memang tidak lagi mengetahui bahasa daerah, walaupun mengetahui hanya penggalan-penggalan kalimat yang biasa dan sering digunakan, sebagian yang lainnya generasi muda ada merasa malu untuk menggunakan bahasa daerah sehingga sekalipun enggan untuk menggunakan bahasa daerah, dipihak orang tua juga tidak menuntut, mengajarkan, dan membudayakan penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan sehari-hari dalam keluarga. Hal ini mengindikasikan bahwa mulai terjadi keengganan untuk melestarikan bahkan mengembangkan budaya yang ada di Minahasa Tenggara oleh masyarakat Minahasa Tenggara itu sendiri.

Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait perlu memperhatikan dan menerapkan strategi tersendiri untuk pengembangan dan pelestarian daerah yang menjadi identitas daerah, sesuai dengan kewenangan desentralisasi yang telah diamankan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, melalui penataan daerah yang ditunjukkan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Peran strategis ini dapat diwujudkan dengan membuat suatu kebijakan pembentukan-pembentukan lembaga adat dimasing-masing desa atau kecamatan, memasukkan muatan kurikulum lokal bahasa dan budaya daerah bagi anak peserta didik di masing-masing jenjang pendidikan sekolah, penggunaan bahasa daerah pada hari-hari tertentu yang dapat dimulai pada lingkungan pemerintahan dan sekolah. Disamping itu diperlukan pula upaya konkrit untuk dapat mengembangkan dan pelestarian budaya Minahasa Tenggara melalui harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif daerah dalam membuat legalitas melalui Peraturan

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara  
Tentang pelestarian budaya.

## b. Pendelegasian Wewenang

Menurut Kepala Bagian Pengembangan Destinasi bahwa pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini pengembangan industri pariwisata menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Pada bagian ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kepariwisataan. Beliau juga menjelaskan bahwa koordinasi juga dilakukan antar daerah.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa:

*“pendelegasian wewenang secara khusus dalam mengembangkan pariwisata tidak ada, namun beliau menegaskan bahwa Bagian dalam organisasinya menjalankan tugas dan fungsi masing-masing”.*

Dalam pemasarannya, citra pariwisata menjadi sangat penting. Oleh karena itu perlu dibangun identitas jati diri dan citra yang menjadi tema utama pemasaran pariwisata minahasa tenggara. Pemasaran dan promosi pariwisata di daerah, pihak industri pariwisata bersama Badan Promosi Pariwisata Daerah (BP2D) bertanggung jawab atas upaya promosi paket wisata serta pelayanan pariwisata yang ditawarkan. Untuk mengembangkan segmen pasar wisatawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah melakukan beberapa hal yang diharapkan efektif untuk mempromosikan Minahasa Tenggara di luar.

*“...selain di kantor dinas kebudayaan dan pariwisata itu sendiri, kami juga membuka Tourist Information Service di Bandara Sam Ratulangi Manado. Ini dilakukan agar wisatawan yang ada datang ke Sulawesi utara khususnya wisatawan mancanegara, mengetahui bahwa masih ada tempat wisata yang indah lainnya di Minahasa Tenggara. Disana kami menugaskan staf kami untuk menjelaskan tentang wisata-wisata apa saja yang ada di*

*Minahasa Tenggara, atau bahkan hanya sekedar membagi-bagikan brosur atau leaflet. Selain itu kami juga terus mengup-date Website kami yang berhubungan dengan pariwisata Minahasa Tenggara agar lebih memudahkan bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Untuk wisatawan lokal, kami mulai mempromosikannya melalui radio-radio lokal dan Koran lokal yang ada...”*

Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari produk kebudayaan dan pariwisata yang beragam, sesuai dengan identitas daerah. Penyiapan sumber daya manusia tidak hanya bagi aparatur pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan generasi muda, tetapi penting pula dipersiapkan berbagai penyuluhan mengenai pariwisata (peluang dan dampaknya) bagi masyarakat awam. Salah satu kebijakan yang sudah mulai dijalankan di bidang pengembangan SDM ini adalah pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan kepariwisataan di daerahnya dengan bantuan untuk kelompok-kelompok usaha kecil di objek wisata tertentu seperti yang dikatakan salah seorang masyarakat berikut ini:

*“...pengelolaan pariwisata oleh pemerintah khususnya di objek wisata pantai lakban ini sudah baik namun kami berharap ditingkatkan lagi. Sejak pembangunan art shop saya sekitar tahun 2002, izin saya tidak dipersulit oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada kami untuk mengembangkan usaha kami secara khusus untuk kelompok yang ada”.*

Pemerintah dalam hal ini dinas kebudayaan dan pariwisata juga berusaha meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata dan kemampuan komunikasi khususnya SDM yang berhadapan langsung dengan wisatawan.

*“...karena Minahasa Tenggara memang sebagai daerah yang baru berkembang sehingga masih jarang dikunjungi oleh wisatawan apalagi mancanegara sehingga kami terus meningkatkan sarana prasarana serta*

*kamampuan SDM untuk terus mempromosikan pariwisata di Minahasa Tenggara”.*

## c. Komunikasi dalam Koordinasi Lintas Sektor

Komunikasi yang dilakukan dalam berkoordinasi bisa terjadi dalam bentuk komunikasi formal dan informal. Komunikasi formal terjadi seperti rapat bulanan atau rapat dalam forum SKPD. Sedangkan komunikasi yang bersifat informal dapat terjadi seperti pertemuan antar pejabat/pegawai Dinas diluar jam kerja. Komunikasi yang dilakukan dalam berkoordinasi juga menggunakan alat komunikasi seperti telepon dan menggunakan jaringan internet.

## d. Anggaran dalam Koordinasi Lintas Sektor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadis Pariwisata dapat diambil kesimpulan bahwa tidak adanya alokasi anggaran yang di khususkan dalam berkoordinasi. Anggaran dalam berkoordinasi yang bersifat formal disebutkan telah menjadi bagian dari masing-masing kegiatan. Sedangkan koordinasi yang sifatnya informal, menggunakan anggaran dari masing-masing pejabat/pegawai Dinas.

## e. Koordinator dalam Pelaksanaan Koordinasi

Komitmen dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yaitu membangun Pariwisata daerah yang lebih maju dengan menciptakan masyarakat sadar wisata yang kemudian masyarakat terangkat dari segi ekonominya dari penjualan produk dan jasa bagi wisatawan. Dengan terangkatnya perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata itulah yang menjadi komitmen Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika juga mempunyai komitmen dalam mengembangkan industri pariwisata daerah dengan mendukung terciptanya transportasi dan arus lalu lintas yang aman dan nyaman. Dengan transportasi yang aman dan nyaman maka diharapkan menjadi nilai yang positif di mata wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.

## f. Mekanisme Pola Koordinasi Lintas Sektor Koordinasi akan menciptakan sinergi

dalam arti terciptanya perpaduan usaha dari berbagai orang, unit, atau organisasi yang menghasilkan output yang lebih besar dibanding jumlah output masing-masing orang, unit atau organisasi bila mereka bekerja sendiri-sendiri atau tanpa koordinasi. Mekanisme pola koordinasi diperlukan komunikasi yang baik, pemimpin sebagai fasilitator dan beberapa fasilitas dalam mekanisme koordinasi seperti forum-forum diskusi, organisasi matriks.

## g. Faktor Pendorong dan Penghambat Koordinasi

Faktor penghambat adanya program pengembangan industri pariwisata ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui hasil wawancara kepada Pak Aziz selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara berikut ini :

*“ ya sebenarnya ada beberapa faktor yang menghambat misalnya faktor anggaran, waktu dan ya faktor ego tadi yang kita bicarakan di awal. Faktor anggaran sudah jelas ketika anggaran program masing-masing SKPD itu kan berbeda jadi nanti untuk penyatuan program antar SKPD jadi sulit karena terbatasnya anggaran. Masalah waktu juga menghambat akan koordinasi kenapa? Misalkan program pengembangan industri pariwisata ini kan lebih memperhatikan pada masalah-masalah yang harus dipecahkan, nah di dalamnya kan kita temukan pembangunan infrastruktur itu sangat penting, nah dari situ dari Dinas Pekerjaan Umum sendiri dalam melakukan pembangunan infrastruktur harus melalui tahap survey, pengukuran baru proses itu kan membutuhkan waktu yang tidak sedikit”.*

## h. Manfaat Koordinasi Lintas Sektor

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa manfaat dari koordinasi lintas sektoral tersebut dapat membantu antar SKPD dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam

# EKSEKUTIF

Volume 2 No. 1 Tahun 2022

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

pembangunan kepariwisataannya ditunjang dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Permasalahan-permasalahan yang ada dalam upaya pengembangan kepariwisataan seperti transportasi, rambu-rambu jalan dan sebagainya dapat diatasi oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

## Penutup

### Kesimpulan

1. Koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan ekowisata di Kabupaten Minahasa Tenggara ini pada kenyataannya memang menghadapi beberapa kendala, sehingga membuat kepariwisataan di Kabupaten Minahasa Tenggara saat ini berjalan dengan apa adanya bahkan cenderung monoton tanpa ada sentuhan yang berarti meskipun terpenuhinya pencapaian beberapa target.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi masalah pada koordinasi lintas sektor dalam mengembangkan industri ekowisata adalah terbatasnya anggaran dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat yang masih lemah

### Saran

1. Meningkatkan posisi kemitraan dengan masyarakat dan swasta, perkembangan industri pariwisata tentunya melibatkan banyak sektor yang memiliki kepentingan masing-masing, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha dengan segala motivasi dan tujuannya. Mengembangkan dan menggalakan kerja sama kemitraan dalam kepariwisataan di Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu cara untuk saling memperkuat dan meningkatkan daya saing. Prinsip dasar kemitraan yaitu mengusung kesetaraan, transparansi, formal dan legal, saling memperkuat, saling memahami, saling menguntungkan. Dalam meningkatkan kemitraan dalam usaha pariwisata, dilakukan dengan mendudukkan kembali dengan tepat prinsip-prinsip kemitraan tersebut yaitu :
  - a. Dianjurkan pihak swasta dan

masyarakat bisa mengambil peran yang sejajar dalam langkah pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

- b. Menciptakan saling ketergantungan dan mempertahankan keseimbangan hubungan kemitraan yaitu antara Pemerintah Kabupaten dengan pihak swasta dan masyarakat karena jika hubungan ketiga pihak tersebut tidak berjalan dengan baik maka pembangunan pariwisata akan terhambat.
  - c. Memberikan perlindungan hukum terhadap hubungan kemitraan yang dijalankan dengan pembuatan peraturan daerah atau keputusan Bupati. Dengan hal tersebut maka para investor akan merasa aman dalam peran sebagai aktor pembangunan.
  - d. Meningkatkan kearifan peran Pemerintah Kabupaten sebagai penentu kebijakan dan pengambil keputusan untuk mengembangkan, mengarahkan, mendorong, dan memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Mengalokasikan anggaran yang jelas dan mencukupi untuk melakukan koordinasi. Dalam proses perencanaan dalam pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara, juga dilakukan penganggaran yang jelas dan tepat untuk menyelenggarakan koordinasi mengingat kegiatan pengembangan industri pariwisata melibatkan banyak pihak. Penganggaran tersebut seperti berapa kali dalam menyelenggarakan rapat koordinasi antar SKPD dengan estimasi biaya yang tepat dan jelas. Dengan anggaran biaya untuk menyelenggarakan koordinasi lintas sektor yang jelas dan tepat maka akan mendorong terciptanya keselarasan, kesatuan tindakan dari setiap individu, bagian, masing-masing Dinas dalam organisasi yaitu Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk terwujudnya Minahasa Tenggara sebagai daerah tujuan wisata yang berdaya saing.

## Daftar Pustaka

- Direktorat Pengembangan Pariwisata,  
Kementerian Pariwisata RI Tahun  
2009.
- Hani Handoko. 2008. Dasar-Dasar  
Manajemen Produksi dan Operasi  
(Edisi 1). BPFE Yogyakarta.
- Ismail Solihin. 2009. Corporate Social  
Responsibility: From Charity to  
Sustainability. Jakarta: Salemba  
Empat.
- Iwan Nugraha. 2012. Ekowisata dan  
Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta:  
Pustaka Pelajar.
- Janianton Damanik & Helmut F. Weber.  
2016. Perencanaan Ekowisata Dari  
Teori ke Aplikasi. Jakarta: Andi  
Publisher.
- Malayu S.P. Hasibuan. 2014. Organisasi dan  
Motivasi: Dasar Peningkatan  
Produktivitas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Marihot AMH Manullang. 2008. Manajemen  
Personalialia. Gadjah Mada University  
Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33  
Tahun 2009 Tentang Pedoman  
Pengembangan Ekowisata di Daerah.
- Purnawan Negara. 2015. Pengembangan  
Desa Melalui Ekowisata, Era Adicitra  
Intermedia Solo.
- Richard L. Daft. 2011. Era Baru Manajemen  
(Buku 1) (Edisi 9). Jakarta: Salemba  
Empat.
- Sugandha, Dann N. 2006. Koordinasi Alat  
Pemersatu Gerak Administrasi  
(cetakan ketujuh edisi revisi). Jakarta:  
Intermedia.
- Sutarto. 2006. Dasar-Dasar Organisasi.  
Yogyakarta: Gajah Mada University  
Press.
- Yohannes Yahya. 2006. Pengantar  
Manajemen. Jakarta: Graha Ilmu.